

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGATASI KETIDAKADILAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA: FOKUS PADA KESENJANGAN ANTARA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Irsalina Irawan, Ario Pamungkas, Zalva Zahiyah, Indra Permana, Arly Feraldi

FIKOM Universitas Esa Unggul

Email : [irsalina.irawan25@gmail.com](mailto:irsalina.irawan25@gmail.com), [ariopamungkas@esaunggul.ac.id](mailto:ariopamungkas@esaunggul.ac.id)

## Abstrak

Di Indonesia, penerapan cita-cita Pancasila sangat penting untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan, terutama mengingat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketidakadilan sosial terwujud dalam kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dalam hal ini, kesenjangan ini diperburuk oleh variabel-variabel seperti kemiskinan, usia, dan lokasi geografis, yang mengakibatkan populasi terpinggirkan. Ciri-ciri kemiskinan di kota dan desa berbeda-beda, dan masing-masing mempunyai kesulitan tersendiri dalam memperoleh layanan dasar. Tidak peduli asal usulnya, setiap orang diperlakukan sama berkat Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan karakter berbasis Pancasila sangat penting untuk menanamkan rasa keadilan sosial pada generasi penerus. Melindungi kelompok masyarakat kurang mampu melalui program bantuan sosial dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif.

**Kata Kunci:** Kesenjangan Perkotaan dan Desa, Kemiskinan, Pancasila, dan Keadilan Sosial

## Abstract

*Particularly in light of the animosity between cities and rural, the application of Pancasila ideals is crucial to Indonesia's fight against injustice and poverty. Social injustice manifests as disparities in access to economic, health, and educational opportunities. In this instance, these disparities are exacerbated by variables like poverty, age, and geographic location, which result in marginalized populations. The features of poverty in cities and villages varies, and each has particular difficulties in obtaining essential services. Pancasila is a set of guidelines to guarantee that everyone is treated fairly, regardless of background, particularly the fifth principle about social justice for all Indonesians. To raise the next generation's sense of social justice, Pancasila character-based education is crucial. In order to build a wealthy and inclusive society, it is also essential to safeguard disadvantaged populations through social assistance programs and include the community in development.*

**Keywords:** *Urban and Village Gaps, Poverty, Pancasila, and Social Justice*

## PENDAHULUAN

Penanaman prinsip moral dan etika yang diperlukan untuk mengakhiri korupsi dapat dilakukan melalui Pancasila. Dendi Sutarto (2019) menegaskan bahwa sistem demokrasi yang adil dan bersih bergantung pada penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan demokrasi.

Kehidupan masyarakat telah berubah secara signifikan di era digital yang ditandai dengan akses informasi yang cepat dan sederhana. Meskipun teknologi memiliki banyak keunggulan, terdapat hambatan yang signifikan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan menyaring informasi yang dapat dipercaya, yang keduanya dapat dirusak oleh kemajuan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin nyata pentingnya menjunjung tinggi cita-cita Pancasila sebagai landasan pelestarian jati diri bangsa Indonesia (Aisyah & Najicha, 2023). Selain sebagai landasan negara, Pancasila merupakan kode moral yang dapat membantu masyarakat dalam mengarungi dilema moral di era digital.

Salah satu masalah terbesar dalam masyarakat saat ini adalah seni sosial, terutama mengingat semakin besarnya kesenjangan antara mereka yang bisa menggunakan teknologi dan mereka yang tidak bisa menggunakan teknologi. Orang atau kelompok yang kesulitan mengakses teknologi digital disebut sebagai “miskin”, sedangkan kelompok lain yang dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka disebut “kaya”. Perbedaan sosial yang lebih luas diakibatkan oleh kesenjangan ini, yang sering kali disebabkan oleh berbagai variabel seperti usia, pendapatan, dan lokasi geografis (Andrianni & Rianto, 2019). Menurut Dendi Sutarto (2019), kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat, khususnya di pedesaan,

seringkali menjadi penyebab ketidakadilan sosial di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 26,42 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan hingga Maret 2020, dengan mayoritas tinggal di pedesaan (BPS, 2020). Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan meskipun terdapat inisiatif untuk memerangi kemiskinan. Fitriyono (2022) menyatakan bahwa jajak pendapat menunjukkan bahwa kesenjangan sosial ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan diperburuk oleh kesenjangan digital.

Untuk mengatasi masalah ini, semua orang di masyarakat harus bekerja sama untuk menawarkan akses dan infrastruktur yang adil. Peningkatan konten lokal yang relevan, kebijakan inklusif, dan pengembangan keterampilan digital diperlukan untuk memastikan akses universal terhadap teknologi (Budiyono, 2020). Untuk menciptakan komunitas yang memupuk akses informasi yang adil dan dapat diandalkan bagi semua orang, masyarakat harus bersatu.

Untuk menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonominya, sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah titik awal yang penting. Hak setiap warga negara atas kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, pekerjaan, dan pendidikan dijunjung tinggi oleh gagasan ini (Jasmine, 2014). Kerusakan sosial dapat dikurangi secara bertahap dengan cara ini.

Kelompok lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang dilindungi ketika prinsip-prinsip Pancasila

dipraktikkan. Karena seringnya mereka mengalami ketidakadilan sosial, kelompok ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat (Harry Saptarianto et al., 2024). Untuk menjaga hak-hak mereka, program bantuan sosial dan perlindungan hukum harus diciptakan.

Masyarakat yang lebih adil dan sukses diyakini akan terwujud jika prinsip-prinsip keadilan sosial diprioritaskan dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama secara lebih efektif jika masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, cita-cita Pancasila bukan sekedar slogan; mereka dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

## PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat telah berubah secara signifikan di era digital kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang cepat dan akses informasi yang lebih sederhana. Meskipun teknologi mempunyai banyak manfaat, kesenjangan sosial dan kemiskinan menimbulkan masalah serius dan semakin terlihat jelas baik di perkotaan maupun pedesaan. Nilai-nilai Pancasila—khususnya sila kelima, yang membahas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia—menjadi sangat relevan dalam situasi ini. Selain sebagai landasan negara, Pancasila merupakan prinsip moral yang menjamin pemerataan akses terhadap peluang dan sumber daya bagi seluruh rakyat. Mengingat isu-isu global yang semakin meningkat, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan cita-cita Pancasila dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia serta mengembangkan masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif.

### A. Ketidakadilan Sosial di Indonesia

Di Indonesia, ketidakadilan sosial mencakup serangkaian kesenjangan sosial, seperti akses terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Arti ketidakadilan sosial menggambarkan keadaan dimana masyarakat atau kelompok tidak mempunyai akses yang sama terhadap hak-hak dasar mereka (Andrianni & Rianto, 2019). Diskriminasi berdasarkan kelas ekonomi, gender, agama, dan etnis adalah contoh ketidakadilan semacam ini. Ada banyak elemen berbeda yang berkontribusi terhadap ketidakadilan ini, namun salah satu yang paling penting adalah lokasi fisik. Dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan, masyarakat yang tinggal di pedesaan seringkali kesulitan mendapatkan fasilitas yang penting (Latif, 2015).

Prinsip-prinsip Pancasila menjadi sangat penting dalam situasi ini. Penerapan cita-cita Pancasila dalam kehidupan demokrasi sangat penting untuk membangun pemerintahan yang adil dan bersih, klaim Suryanto & Adon (2023). Hal ini krusial karena kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat seringkali berujung pada ketidakadilan sosial.

### B. Kemiskinan Perkotaan dan Desa

Di Indonesia, kemiskinan terlihat berbeda di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan kurangnya keterampilan yang memenuhi permintaan pasar merupakan ciri umum kemiskinan di wilayah metropolitan. Masyarakat miskin perkotaan sering kali terpaksa menjalani pekerjaan informal dengan upah rendah (Fitriyono, 2022). Namun, kemiskinan di wilayah pedesaan lebih erat kaitannya dengan terbatasnya akses terhadap layanan publik dan infrastruktur, termasuk kesehatan dan pendidikan. Pada bulan Maret 2020, Badan

Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 26,42 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan, sebagian besar berasal dari daerah pedesaan (BPS, 2020). Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan meskipun terdapat inisiatif untuk memerangi kemiskinan.

Sidabutar dkk. (2023) menyatakan bahwa representasi digital berdampak pada bagaimana wilayah perkotaan dan pedesaan terwakili secara sosial ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan karakter berdasarkan Pancasila dapat menumbuhkan rasa keadilan sosial pada generasi muda (Janatin & Kurnia, 2022). Siswa belajar menghargai keberagaman dan pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menginternalisasikan keyakinan Pancasila.

### **C. Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila**

#### **1. Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila**

Untuk membangkitkan rasa keadilan sosial generasi penerus, pendidikan berbasis karakter Pancasila sangatlah penting. Siswa belajar menghargai keberagaman, bersimpati terhadap sesama, dan menyadari pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menginternalisasikan keyakinan Pancasila (Budiyono, 2020). Selain akademik, pendidikan ini menekankan pada pengembangan karakter, sehingga menghasilkan manusia yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

#### **2. Melindungi Populasi Rentan**

Komponen kunci dalam mencapai keadilan sosial adalah melindungi kelompok marginal. Program bantuan sosial dan

perlindungan hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, karena mereka sering menghadapi prasangka dan hak-hak mereka diabaikan (Harry Saptarianto et al., 2024). Diharapkan ketidakadilan sosial dapat dikurangi dan hak-hak setiap orang dapat dinikmati secara adil dengan memberikan perhatian lebih pada kelompok tertentu.

#### **3. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan**

Rahasia untuk mengembangkan kebijakan inklusif yang memenuhi tuntutan seluruh lapisan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan ini mencakup pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik dan mengawasi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan (Mawardi, 2010). Keterlibatan aktif masyarakat akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama, serta memajukan keadilan sosial di negara ini.

#### **4. Penggunaan Teknologi Informasi Secara Etis**

Komponen penting dalam mengamalkan keyakinan Pancasila di era digital modern adalah penggunaan teknologi informasi secara etis. Sidabutar dkk. (2023) menegaskan bahwa untuk mencegah dampak buruk bagi masyarakat, pemanfaatan teknologi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip moral. Oleh karena itu, untuk mengurangi kehadiran digital, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

## 5. Transformasi Kebijakan Publik

Langkah penting lainnya dalam menerapkan gagasan Pancasila untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial adalah mengubah kebijakan pemerintah. Kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan tuntutan seluruh lapisan masyarakat (Unggul et al., 2020). Hal ini mencakup memastikan bahwa dana pemerintah didistribusikan secara adil untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan cita-cita Pancasila dapat membantu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia. Diyakini bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif dapat dibangun dalam menghadapi permasalahan dunia yang semakin meningkat. Penerapan cita-cita Pancasila secara konsisten diperlukan untuk mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi secara signifikan dan menutup kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan.

## KESIMPULAN

Penerapan cita-cita Pancasila dalam upaya memerangi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia sangatlah penting, terutama mengingat kesulitan yang ditimbulkan oleh era digital. Maraknya ketidakadilan sosial baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan menunjukkan adanya kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kesenjangan ini mengakibatkan kelompok masyarakat kehilangan haknya karena berbagai faktor, termasuk usia, pendapatan, dan lokasi geografis. Andrianni dan Rianto (2019) menegaskan bahwa agar setiap orang dapat menikmati hak-hak dasar

mereka secara adil, kesenjangan ini perlu diatasi.

Ciri-ciri kemiskinan di kota dan desa berbeda-beda, dan masing-masing mempunyai kesulitan tersendiri dalam memperoleh layanan dasar. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan pekerjaan informal yang berbahaya merupakan ciri umum kemiskinan di daerah perkotaan, namun di daerah pedesaan, hal ini lebih terkait erat dengan infrastruktur dan layanan publik yang tidak memadai seperti kesehatan dan Pendidikan (Fitriono, 2022). Cita-cita Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pedoman dalam situasi ini untuk menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil, apa pun latar belakangnya.

Untuk membangkitkan rasa keadilan sosial generasi penerus, pendidikan berbasis karakter Pancasila sangatlah penting. Budiyo (2020) menekankan bahwa pendidikan ini menekankan pada pengembangan karakter selain akademik, sehingga menghasilkan manusia yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosialnya. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan inklusif, penting juga untuk melindungi kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui program bantuan sosial dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan (Harry Saptarianto et al., 2024).

Indonesia dapat menghadapi tantangan internasional dengan tetap menjaga keunikannya sebagai negara yang dilandasi cita-cita tinggi dengan menjadikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai prioritas utama dalam kebijakan publik dan operasional sehari-hari. Langkah penting lainnya dalam menerapkan gagasan Pancasila untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial adalah mengubah kebijakan pemerintah (Unggul et al., 2020). Kebijakan harus dirumuskan dengan

mempertimbangkan tuntutan seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan cita-cita Pancasila dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan, serta menjadi sarana untuk mengatasi ketidakadilan dan kemiskinan. Indonesia dapat mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama dan membantu mereka yang paling membutuhkan. Penerapan cita-cita Pancasila secara konsisten diperlukan untuk mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi secara signifikan dan menutup kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan.

#### DAFTAR PUSAKA

- Aisyah, F. N., & Najicha, F. U. (2023). Integrasi Pancasila dalam Penggunaan Teknologi yang Beretika di Era Digital. Research Gate.
- Budiyono, S. (2020). Bahasa dan Sastra di Era Digital dalam Konteks Masyarakat Global. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 4(1), 1-8. <https://journal.umsurabaya.ac.id/lingua/article/view/4315>
- Fitriono, R. (2022). Panduan Moral Pancasila untuk Masyarakat dan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Pancasila*, 4(2), 88-100.
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (2020). Laporan Survei Demokrasi di Indonesia Agustus 2020.
- Saptarianto, H., et al. (2024). Strategi Bisnis dan Literasi Digital: Menjawab Tantangan Era Media Sosial. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu*
- Rahman, A., et al. (2022). Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila untuk Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(4), 101-115.
- Saptarianto, H., et al. (2024). Era Digital dan Dampak Sosial di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(1), 12-25.
- Sidabutar, Y., et al. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Negara di Era Digital: Tantangan Mahasiswa. *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 7(4), 225-231.
- Sudrajat, J. A., et al. (2024). Pancasila dan Keadilan Sosial di Era Digital: Tinjauan Teoritis. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 10(4).
- Suryanto, Y., & Adon, M. J. (2023). Implementasi Pancasila dalam Berbangsa dan Bernegara di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pancasila*, 12(1), 33-50.
- Unggul, H., et al. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila: Nilai-Nilai Moral dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 15-30.